

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Sebagai dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Setiap pelaksanaan urusan pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan, pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Strategik dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan/ Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 tahun 2010 Tentang kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah dimaksud dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dipimpin oleh Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau sebagai salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang kebencanaan, telah berusaha untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sejalan dengan tujuan masyarakat terhadap terciptanya *Good Governance*. Dan sebagai perwujudan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 yang akan

mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 tahun 2010 Tentang kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah.

1.3 Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 tahun 2010 Tentang kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2. Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan perkumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugasnya sesuai Bab II Pasal 4 ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan teknis dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana;
- b. Perumusan dan penetapan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh;
- d. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan kator Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 tahun 2010 Tentang kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Aspek strategis yang di jalankan meliputi:

1. Pra Bencana

Tahap Pencegahan dan Mitigasi – Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.

2. Saat Terjadi Bencana.

Tahap Tanggap Darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan logistik pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.

3. Pasca Bencana.

Tahap Rehabilitasi, dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang pada prioritas pembangunan, maka aspek strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran urusan penanggulangan bencana sebagai berikut :

- 1. Merumuskan dan melaksanakan sasaran dalam rangka pencegahan bencana di daerah.
- 2. Melakukan pelaksanaan fungsi tanggap darurat pada saat terjadi bencana di daerah.
- 3. Melaksanakan penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana di daerah.
- 4. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi di daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau, berikut data bencana yang terjadi pada tahun 2022 di Kabupaten Malinau.

Tabel 1.1
Jenis Bencana Banjir di Kabupaten Malinau
Periode 1 Januari – 31 Desember 2022

No	Kecamatan	Desa	Rumah Terendam	Jumlah Penduduk Terdampak		Jumlah Korban		Luka/Sakit /Menderita	Perkiraan Kerugian (Rp)
				Jiwa	KK	Mengungsi	Meninggal	Jiwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Malinau Utara	Tanjung Lima	-	172	43	-	-	-	-
2	Malinau Utara	Malinau Seberang	99	3.860	965	-	-	-	-
3	Malinau Utara	Respen Tubu	47	452	188	-	-	-	-
4	Malinau Utara	Belayan	5	964	241	-	-	-	-
5	Malinau Utara	Salap	21	596	149	-	-	-	-
6	Malinau Utara	Putat	-	288	72	-	-	-	-
7	Malinau Utara	Luso	4	156	39	-	-	-	-
8	Malinau Utara	Sembuk Warot	-	4	1	-	-	-	-
9	Malinau Kota	Malinau Kota	1.418	17.440	4.360	-	-	-	-
10	Malina Kota	Pelita	122	1.764	441	-	-	-	-
11	Malinau Kota	Malinau Hulu	39	2,412	603	-	-	-	-
13	Malinau Kota	Tanjung Keranjang	-	40	10	-	-	-	-
14	Malinau Barat	Sempayang	-	256	64	-	-	-	-
15	Malinau Barat	Sesua	-	108	27	-	-	-	-
16	Malinau Barat	Kuala Lapang	53	1.572	393	-	-	-	-
17	Malinau Barat	Tanjung Lapang	11	1.748	437	-	-	-	-
18	Mentarang	Singai Terang	18	456	114	-	-	-	-
19	Mentarang	Lon Liku	-	124	31	-	-	-	-
20	Mentarang	Paking	-	396	99	-	-	-	-
21	Mentarang	Pulau Sapi	7	636	159	-	-	-	-
22	Mentarang	Mentarang baru	-	860	215	-	-	-	-
23	Mentarang Hulu	Lung Berang	-	164	41	-	-	-	-
24	Sungai Tubu	Long Pada	-	196	49	-	-	-	-
25	Sungai Tubu	Long Rantau	-	-	-	-	-	-	-
26	Sungai Tubu	Long Titi	-	-	-	-	-	-	-
27	Pujungan	Long Pujungan	-	-	-	-	-	-	-
28	Bahau Hulu	Apau Ping	-	-	-	-	-	-	-
29	Bahau Hulu	Berini	-	-	-	-	-	-	-
30	Bahau Hulu	Long kemuat	-	-	-	-	-	-	-
31	Bahau Hulu	Long Alango	-	-	-	-	-	-	-
32	Bahau Hulu	Long Uli	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

Tabel 1.2
Jenis Bencana Kecelakaan Air di Kabupaten Malinau
Periode 1 Januari – 31 Desember 2022

No	Kecamatan	Terjadinya Bencana	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
			Mengungsi	Meninggal	
1	2	3	4	5	6
1	Malinau Barat	Orang Hilang	1	-	-
2	Malinau Selatan	Orang Hilang	1	-	-
1	Mentarang	Perahu Terbalik	-	1	-
2	Malinau Utara	Laka Kerja	-	1	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

Tabel 1.3
Jenis Bencana Kebakaran Hutan/Lahan di Kabupaten Malinau
Periode 1 Januari – 31 Desember 2022

No	Kecamatan	Status	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
			Mengungsi	Meninggal	
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Malinau	389,98 Ha	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

Tabel 1.4
Jenis Bencana Kebakaran Rumah Tinggal di Kabupaten Malinau
Periode 1 Januari – 31 Desember 2022

No	Kecamatan	Luka/sakit (Jiwa)	Jumlah Penduduk /Jiwa/ Terdampak	Jumlah Korban		Rumah RB	Rumah RR	Perkiraan Kerugian (Rp)
				Mengungsi	Meninggal	Unit	Unit	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Malinau Kota	-	8	4	-	2	-	569.060.000
2	Malinau Utara	-	17	8	-	2	-	817.650.000
3	Malinau Barat	-	10	7	-	-	3	538.990.000
4	Malinau Selatan	-	4	4	-	1	-	121.600.000
5	Bahau Hulu	-	2	2	-	2	-	300.000.000
6	Mentarang Hulu	-	16	10	-	1	-	762.310.000

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

Tabel 1.5
Jenis Bencana Tanah Longsor dan Gempa Bumi di Kabupaten Malinau
Periode 1 Januari – 31 Desember 2022

No	Kecamatan	Rumah (Unit)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
			Mengungsi	Meninggal	
1	2	3	4	5	6
1	Malinau Utara	1	4	-	-
2		-	-	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

Tabel 1.5
Jenis Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Malinau
Periode 1 Januari – 31 Desember 2022

No	Kecamatan	Rumah (Unit)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
			Mengungsi	Meninggal	
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau sampai akhir tahun 2022 didukung oleh Sumber Daya :

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah seluruh pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau sebanyak 40 orang, Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 32 Orang, Non PNS sebanyak 8 Orang.

Adapun Secara umum data Pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel.

Tabel 1.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Per 31 Desember 2022

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S2	6
2	S1	8
3	DIII	5
4	SLTA	12
5	SD	1
JUMLAH		32

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kab.Malinau

Tabel 1.7
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon
Per 31 Desember 2022

NO.	ESELON	JUMLAH (ORANG)
1	II	1
2	III	4
3	IV	9
4	Non Eselon	18
JUMLAH		32

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kab.Malinau

Tabel 1.8
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Per 31 Desember 2022

No.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	6
2	III	13
3	II	12
4	I	1
JUMLAH		32

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kab.Malinau

Tabel 1.9
Komposisi Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2021

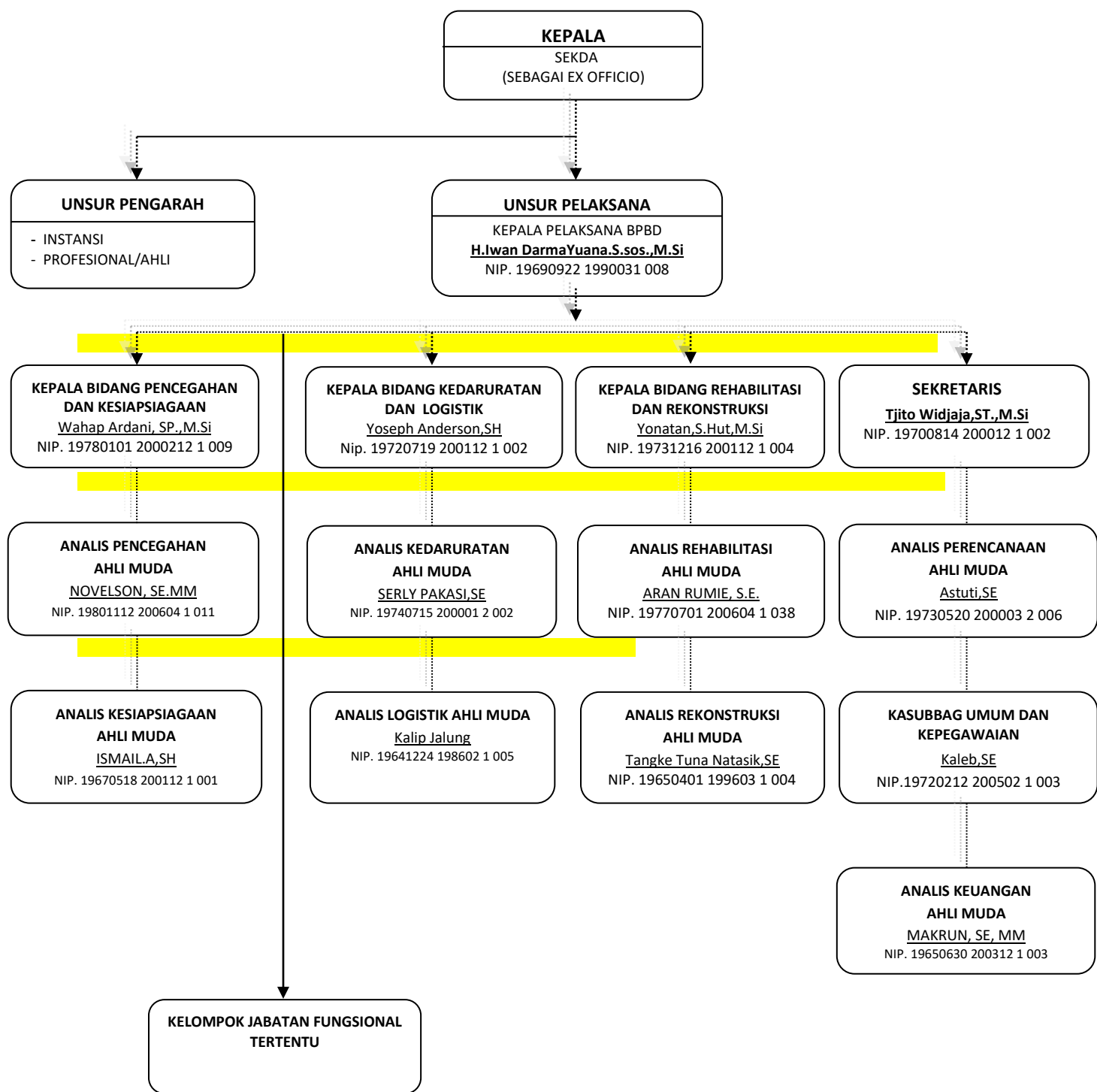
No.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1.	S1	1
2.	SLTA	7
JUMLAH		8

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kab.Malinau

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2015 terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Analis Keuangan Ahli Muda;
 - c) Analis Perencanaan Ahli Muda;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - a) Analis Pencegahan Ahli Muda;
 - b) Analis Kesiapsiagaan Ahli Muda;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - a) Analis Kedaruratan Ahli Muda;
 - b) Analis Logistik Ahli Muda.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - a) Analis Rehabilitasi Ahli Muda;
 - b) Analis Rekonstruksi Ahli Muda.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2022
Per 31 Desember 2022



b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau pada saat ini antara lain berupa :

- a) Penunjang kegiatan administrasi kantor
- b) Penunjang kegiatan pelaksanaan petugas lapangan

c. Anggaran

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan di tahun 2022 sebesar Rp. 4.592.262.852,00 dijabarkan ke dalam 2 Program 4 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran yang bersumber pada APBD Kabupaten Malinau.

2. Permasalahan Utama

Analisis isu Strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau meliputi :

- a. Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malinau;
- b. Dokumen Pedoman Penanggulangan Bencana masih kurang;
- c. Koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana lintas sektoral Kabupaten Malinau masih kurang;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana serta logistik dalam penanganan kebencanaan;
- e. Pengetahuan dan partisipasi masyarakat usaha dan swasta Kabupaten Malinau dalam Penanggulangan Bencana masih kurang.

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Permenpan 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS;
- 4. Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Permenpan 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 ;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;

1.6 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau;
2. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemangku kepentingan;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau.
4. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian penghargaan (reward) maupun sanksi.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Malinau Tahun 2021-2026 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan oleh DPRD Malinau dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 mengacu kepada RPJMD Tahun 2021 – 2026, dimana berisi tujuan, sasaran, program, indikator kinerja utama, indikator kinerja program serta kegiatan yang akan dilaksanakan, disesuaikan dan memiliki benang merah dengan substansi RPJMD Kabupaten Malinau dimaksud.

Sebagaimana termuat dalam dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026, Visi Kabupaten Malinau adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung
Pemerintahan yang Profesional ”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;

- 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
- 3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- 4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Misi Pertama yaitu *Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.*

2.2 Indikator Tujuan dan Sasaran

Indikator Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Malinau yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagaimana table berikut.

Tabel 2.1
Indikator Tujuan dan Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Penanggulangan Bencana secara terpadu		Persentase kejadian bencana yang ditangani atau direspon	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Prosentase Penyampaian informasi kejadian bencana kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca Bencana Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arahan kebijakan, berikut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

VISI	Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintah yang Profesional		
Misi ke-1	Mewujudkan sumber Daya Manusia yang Unggul		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Penanggulangan Bencana secara terpadu	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Peningkatan layanan umum penanggulangan bencana	Peningkatan penanganan darurat bencana.
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Resiko Bencana	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Resiko Bencana.
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kebencanaan	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kebencanaan
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Peningkatan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	Meningkatkan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Logistik Bencana	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Serta Logistik Bencana
	Meningkatnya Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Peningkatan Koordinasi Yang Baik dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Koordinasi Yang Baik dalam Penanggulangan Bencana

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

2.4 Program

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, maka program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau yang disusun untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- 1) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 3) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e) Penyediaan Bahan/Material
- 4) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 5) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. **Program Penanggulangan Bencana**
- 1) **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**
 - a) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - b) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 - 2) **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**
 - a) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - b) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - c) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - d) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - 3) **Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota**
 - a) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - b) Penyusunan Rencana Kontijensi
 - c) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 4) **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**
 - a) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - b) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - c) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - d) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

2.5 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja sebagaimana penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau untuk mencapainya pada tahun 2022.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Target kinerja dari sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Penanggulangan Bencana secara terpadu		Persentase kejadian bencana yang ditangani atau direspon	%	100
		Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Prosentase Penyampaian informasi kejadian bencana kepada masyarakat	%	100
			Persentase Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	%	100
		Meningkatnya Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca Bencana Kabupaten	%	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

2.6 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kerja (Renja)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2022

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana	100%	4.592.262.852,00
		Kegiatan Aministrasi Keuangan	100 %	4.592.262.852,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 PNS	4.592.262.852,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	79.328.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	30 jenis	50.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	29.328.000,00
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-

		Sub. Kegiatan pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	-	-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-
		Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	70.547.000,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	100 %	70.547.000,00
2	Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	100 %	479.600.000,00
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	479.600.000,00
		Sub. Kegiatan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	230.000.000,00
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100 %	249.600.000,00
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	-	-
		Sub. Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-
		Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

2.7 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dapat lebih terarah dan terdapat tolak ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Malinau.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai tabel berikut.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau
Tahun Anggaran 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatkan Penanggulangan Bencana secara terpadu	Persentase kejadian bencana yang ditangani atau direspon	%	100
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Prosentase Penyampaian informasi kejadian bencana kepada masyarakat	%	100
	Pensentase Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	%	100
Meningkatnya Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca Bencana Kabupaten	%	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Penyampaian Informasi kejadian bencana kepada masyarakat	Persentase Penyampaian Informasi kejadian bencana kepada masyarakat	100%	100 %	
		Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagan terhadap Bencana.	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagan terhadap Bencana.	100%	100 %	
2.	Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	100%	100 %	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemulihan pasca bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca bencana	100 %	100 %	

No	Kegiatan	Pagu Anggaran		Keterangan
		Sebelum perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	
1.	Kegiatan Aministrasi Keuangan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.592.262.852,00	4.592.262.852,00	
2.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub. Kegiatan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	249.600.000,00	249.600.000,00 230.000.000,00	Penambahan Anggaran dari TAPE
3.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.547.000,00	70.547.000,00	
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.328.000,00	79.328.000,00	
	Jumlah	4.991.737.852,00	5.221.737.852,00	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP merupakan wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Setiap periode instansi melakukan pengukuran pencapaian, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan anatara target kinerja dengan realisasi kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Rencana Strategis dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan pimpinan untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.

Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 dilakukan dengan cara sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 750\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Rumus Perhitungan :

Capaian Kinerja

=

Realisasi

Target

x 100%

3.2 Analisis Capaian Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 adalah untuk mengetahui apakah Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau pada tahun bersangkutan telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah di rencanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatkan Penanggulangan Bencana secara terpadu	Persentase kejadian bencana yang ditangani atau direspon	100%	100%	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Prosentase Penyampaian informasi kejadian bencana kepada masyarakat	100%	88,50%	88,50	Tinggi
		Pensentase Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	100%	100%	100	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca Bencana Kabupaten	100%	100%	100	Sangat Tinggi

Sumber Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Persentase kejadian bencana yang ditangani atau direspon bencana dari target 100% Realisasi 100% sehingga capaian indikator kinerja 100 % kategori penilaian Sangat Tinggi

2. Prosentase Penyampaian informasi kejadian bencana kepada masyarakat bencana dari target 100% Realisasi 88,50% sehingga capaian indikator sasaran kinerja 88,50 % kategori penilaian Tinggi
3. Pensentase Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana bencana dari target 100% Realisasi 100% sehingga capaian indikator sasaran kinerja 100 % kategori penilaian Sangat Tinggi
4. Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana bencana dari target 100% Realisasi 100% sehingga capaian indikator sasaran kinerja 100 % kategori penilaian Sangat Tinggi
5. Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca Bencana Kabupaten bencana dari target 100% Realisasi 100% sehingga capaian indikator sasaran kinerja 100 % kategori penilaian Sangat Tinggi

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022 rata-rata 97,70%. Sehingga secara keseluruhan capaian kinerja dalam status sangat baik.

2. **Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2022, termasuk kategori sangat berhasil.

Perbandingan antara Target, realisasi serta capaian Renstra Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 dapat tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Capaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	2020			2021			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	2020	2021
1.	Meningkatkan Penanggulangan Bencana secara terpadu	Persentase kejadian bencana yang ditangani atau direspon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
2	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan	Prosentase Penyampaian informasi kejadian bencana	88,50%	100%	88,00%	88,00%	100%	81,53%	81,53%	5,67%	8,55%

	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	kepada masyarakat									
		Persentase Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
3	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
4	Meningkatnya Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca Bencana Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%

Sumber Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Malinau, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional. Pada table diatas dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang capaian kinerjanya tercapai sesuai target. Namun ada satu indikator yang tidak tercapai sesuai target yaitu dari target 100% realisasinya 88,50%, Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 terdapat kenaikan masing-masing sebesar 5,67% dan 8,55%. Artinya terdapat tren positif dari tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (tahun 2022) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dapat tersaji pada tabel berikut :

Tabel.3.4
Capaian Kinerja IKU Dibandingkan Dengan Capaian Tahun Sebelumnya dan Terhadap Target Akhir RENSTRA
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan Penanggulangan Bencana secara terpadu		Persentase kejadian bencana yang ditangani atau direspon	100%	100%	100%
2		Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Prosentase Penyampaian informasi kejadian bencana kepada masyarakat	100%	88,5%	88,5%
			Persentase Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%

3		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	100%	100%	100%
4		Meningkatnya Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca Bencana Kabupaten	100%	100%	100%

Sumber Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Realisasi Kinerja dengan target tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dimaksudkan untuk mengetahui pemyebab keberhasilan/kegagalan yang dicapai dapat tersaji pada tabel berikut.

Tabel.3.5
Capaian Analisis Keberhasilan/Kegagalan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1.	Meningkatkan Penanggulangan Bencana secara terpadu	Persentase kejadian bencana yang ditangani atau direspon	100%	100%	100%	Berhasil	Dipertahankan
2	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Prosentase Penyampaian informasi kejadian bencana kepada masyarakat	100%	88,5%	88,5%	Gagal	Ditingkatkan
		Pensentase Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	Berhasil	Dipertahankan
3	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	100%	100%	100%	Berhasil	Dipertahankan
4	Meningkatnya Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca Bencana Kabupaten	100%	100%	100%	Berhasil	Dipertahankan

Sumber Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3.5 diatas, terdapat satu indikator yang tidak mencapai target (gagal) yaitu indikator sasaran Prosentase Penyampaian informasi kejadian bencana kepada masyarakat dari target 100%, realisasinya 88,50% . Hal ini karena tidak terpenuhinya hal ini dikarenakan target Renja yang iusulkan tidak terpenuhi secara maksimal karena terdapat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang masih berlanjut sehingga kegiatan yang semula sudah direncanakan tidak bisa terlaksana. Untuk itu solusi kedepannya adalah melakukan peningkatan upaya-upaya pencapaian target yang ditetapkan melalui optimalisasi program kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau.

Tabel 3.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Indikator Kinerja	Faktor Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Persentase kejadian bencana yang ditangani	Upaya dalam mencapai target : a. Selalu siaga 24 jam	Faktor pendukung pencapaian target adalah : a. Memiliki SDM sejumlah	Faktor penghambat pencapaian target : a. Kurangnya SDM

	atau direspon	setiap hari untuk mengantisipasi kejadian yang terjadi sewaktu-waktu.	40 Orang (32 Orang PNS dan 8 Orang Non PNS)	(pesonil) lapangan dalam upaya penanggulangan bencana.
2	Prosentase Penyampaian informasi kejadian bencana kepada masyarakat	b. Merespon cepat setiap ada laporan kejadian bencana c. Melaksanakan monitoring di tempat-tempat yang rawan terjadi bencana.	b. Komitmen Pimpinan dan Staf dalam penanggulangan Bencana c. Dukungan BPBD Provinsi d. Dukungan BNPB e. Peraturan Perundang-undangan terkait penanggulangan bencana. f. Partisipasi masyarakat. g. Memaksimalkan relawan dan organisasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. h. Melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya penanggulangan bencana. i. Memaksimalkan peralatan-peralatan yang sudah ada. j. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam penanggulangan bencana	b. Kurangnya peralatan logistik dan rescuer dalam penunjang kegiatan penanggulangan bencana dan penyelamatan korban. c. Masih terbatasnya dokumen pedoman penanggulangan bencana daerah d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dini terhadap penanggulangan bencana walaupun hanya kecil; e. Masih minimnya jumlah personil BPBD yang belum berpengalaman di bidangnya; f. Realisasi pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana terlaksana di akhir tahun karena kondisi pandemic covid 19 yang melanda Indonesia khususnya Kabupaten Malinau; g. Tidak tersedianya pengadaan bahan baku bangunan; h. Tidak tersedianya belanja bahan logistik; i. Kantor dan Gudang Logistik dan peralatan terbatas.
3	Pensentase Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Inovasi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target : Membentuk jejaring komunikasi yang lebih luas dengan perangkat desa dan RT serta relawan seluruh wilayah di kabupaten Malinau untuk mempermudah mendapatkan informasi terkait situasi dan kondisi di wilayah tersebut.		
4	Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana			
5	Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca Bencana Kabupaten			

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Anggaran tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dimaksudkan untuk mengetahui hasil yang dicapai dapat tersaji pada tabel berikut.

Tabel.3.7
 Capaian Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatkan Penanggulangan Bencana secara terpadu	Persentase kejadian bencana yang ditangani atau direspon	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana	100	Menunjang
2	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Prosentase Penyampaian informasi kejadian bencana kepada masyarakat	88,50	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban	100	Menunjang

					Bencana		
		Pensentase Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100				
3	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	100				
4	Meningkatnya Pelayanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca Bencana Kabupaten	100				

Sumber Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3.7 terlihat bahwa program/kegiatan menunjukan penunjang pencapaian kinerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai table berikut.

Tabel 3.8
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

No	Indikator Kinerja		Faktor Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan			
1	Persentase kejadian bencana yang ditangani atau direspon	- Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana - Persentase Pelayanan dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	- Komitmen Pimpinan - Optimalisasi seluruh sumber daya yang tersedia	- SDM yang tersedia - Anggaran yang tersedia	a. Kurangnya SDM (pesonil) dalam upaya penanggulangan bencana. b. Kurangnya peralatan logistik dan rescuer dalam penunjang kegiatan penanggulangan bencana dan penyelamatan korban. c. Masih terbatasnya dokumen pedoman penanggulangan bencana daerah d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dini terhadap penanggulangan bencana walaupun hanya kecil; e. Masih minimnya jumlah personil BPBD yang belum berpengalaman di bidangnya;
2	Prosentase Penyampaian informasi kejadian bencana kepada masyarakat				
3	Persentase Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana				
4	Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana				
5	Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca Bencana Kabupaten				

					f. Realisasi pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana terlaksana di akhir tahun karena kondisi pandemic covid 19 yang melanda Indonesia khususnya Kabupaten Malinau; g. Tidak tersedianya pengadaan bahan baku bangunan; h. Tidak tersedianya belanja bahan logistic; i. Gudang Logistik dan peralatan terbatas.
--	--	--	--	--	--

6. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas efisiensi Anggaran tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dimaksudkan untuk mengetahui hasil yang dicapai dapat tersaji pada tabel berikut.

Tabel.3.9
Realisasi Indikator Dan Anggaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022

Program	Indikator	Targ et	Anggaran				Capaian Anggaran Kinerja	Penanggung jawab	Persenta se Capaian	Efisien si
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana	100%	4.592.262.852				4.331.720.573	Sekretaris	94,33%	5,67%
Program Penanggulang an Bencana	Persentase Pelayanan dalam rangka Pencegahan , Mitigasi dan Penyelamat an serta Evakuasi Korban Bencana	100%	479.600.000				423.213.000	Bidang PK	88,24%	11,76%

Sumber Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau

Untuk melakukan analisis pada tabel 3.9 diatas, digunakan pendekatan pengukuran kinerja untuk melihat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut.

Persentase				Keterangan
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Kategori
0 s/d 13	0 s/d 26	0 s/d 38	0 s/d 50	Sangat Rendah
13.1 s/d 17 2	26.1 s/d 33	38.1 s/d 49 5	50.1 s/d 65 Re	Renda
17.1 s/d 19	33.1 s/d 38	49.1 s/d 56	65.1 s/d 75	Sedang
19.1 s/d 23	38.1 s/d 46 5	56.1 s/d 68	75.1 s/d 90 T	Tinggi
23.1 lebih	46.1 lebih 6	68.1 lebih	90.1 lebih S	Sangat Tinggi

(sumber : Permendagri 86 / 2017)

Berdasarkan analisis pada Tabel 3.9 diatas, bahwa terdapat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Jika tinjau dari aspek efektivitas indikator program yang ditetapkan sesuai dengan target yaitu 100%, sedangkan dari aspek efisiensi ditinjau dari sumber daya anggaran yang tersedia ternyata terjadi efisiensi anggaran masing-masing program sebesar 5,67% dan 11,76%.

Tabel 3.10
Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

No	Indikator Kinerja	Faktor Keberhasilan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana	Optimalisasi seluruh potensi sumber daya yang ada	Komitmen Pimpinan dan penanggung jawab program kegiatan	a. Kurangnya SDM (pesonil) dalam upaya penanggulangan bencana. b. Kurangnya peralatan logistik dan rescuer dalam penunjang kegiatan penanggulangan bencana dan penyelamatan korban. c. Masih terbatasnya dokumen pedoman penanggulangan bencana daerah d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dini terhadap penanggulangan bencana walaupun hanya kecil; e. Masih minimnya jumlah personil BPBD yang belum berpengalaman di bidangnya; f. Realisasi pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana terlaksana di akhir tahun karena kondisi pandemic covid 19 yang melanda Indonesia khususnya Kabupaten Malinau; g. Tidak tersedianya pengadaan bahan baku bangunan; h. Tidak tersedianya belanja bahan logistic; i. Gudang Logistik dan peralatan terbatas.
2	Persentase Pelayanan dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana			

3.3 Permasalahan dan Solusi

2. Permasalahan

- Beberapa permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 dalam penanggulangan bencana, antara lain :
- a. Kurangnya SDM (pesonil) dalam upaya penanggulangan bencana.
 - b. Kurangnya peralatan logistik dan rescuer dalam penunjang kegiatan penanggulangan bencana dan penyelamatan korban.
 - c. Masih terbatasnya dokumen pedoman penanggulangan bencana daerah
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dini terhadap penanggulangan

- bencana walaupun hanya kecil;
- e. Masih minimnya jumlah personil BPBD yang belum berpengalaman di bidangnya;
- f. Realisasi pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana terlaksana di akhir tahun karena kondisi pandemic covid 19 yang melanda Indonesia khususnya Kabupaten Malinau;
- g. Tidak tersedianya pengadaan bahan baku bangunan;
- h. Tidak tersedianya belanja bahan logistic;
- i. Gudang Logistik dan peralatan terbatas.

2. Solusi

Adapun solusi yang di upayakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1) Upaya dalam mencapai target

Dalam hal ini upaya untuk mencapai suatu target yang sudah di rencanakan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

- a. Selalu siaga 24 jam setiap hari untuk mengantisipasi kejadian yang terjadi sewaktu-waktu.
- b. Merespon cepat setiap ada laporan kejadian bencana
- c. Melaksanakan monitoring di tempat-tempat yang rawan terjadi bencana.

2) Upaya dalam menghadapi kendala

Dalam hal ini yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau dalam upaya megatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan bencana sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan relawan dan organisasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
- b. Melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya penanggulangan bencana.
- c. Memaksimalkan peralatan-peralatan yang sudah ada.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam penanggulangan bencana

3) Inovasi

Dalam hal ini perlu adanya suatu Inovasi yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan kegiatan penanggulangan bencana antara lain :

- a. Membentuk 1 desa 1 relawan di seluruh wilayah kabupaten Malinau.
- b. Membentuk jejaring komunikasi yang lebih luas dengan perangkat desa dan relawan seluruh wilayah di kabupaten Malinau untuk mempermudah mendapatkan informasi terkait situasi dan kondisi di wilayah tersebut.

4) Program kegiatan yang mendukung indikator tersebut

Dalam hal ini ada beberapa kegiatan yang mendukung indikator tersebut, antara lain:

- a. Penanganan Darurat Bencana
- b. Fasilitasi Pusat Pengendalian Operasi

3.4 Realisasi Anggaran

Berikut disajikan realisasi anggaran program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 setelah anggaran perubahan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau
Tahun Anggaran 2022

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Belanja	5.221.737.852,00	5.178.146.573,00	99,94
2.	Belanja Tidak Langsung	4.592.262.852,00	4.198.472.493,00	91,42
3.	Belanja Langsung	479.600.000,00	423.213.000,00	78,13
	A. Belanja Pegawai			
	B. Belanja Barang dan Jasa	149.875.000,00	133.248.080,00	88,40
	C. Belanja Modal	-	-	0

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI nomor 239/9/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Penanggulangan bencana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh yang diatur dalam Undang– Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malinau pada tahun anggaran 2022 telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaksanaan serangkaian program-kegiatan yang diembannya. Pada tahun ini ada sedikit perbedaan di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, tetapi secara umum kinerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malinau pada tahun anggaran 2022 dapat dinyatakan berhasil.

Malinau, 3 Februari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malinau

IWAN DARMA YUANA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19690922 199003 1 008

LAMPIRAN I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IWAN DARMA YUANA, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN MALINAU**

Selanjutnya diebut sebagai Pihak Pertama

Nama : **WEMPI W MAWA, SE.,M.H**
Jabatan : **BUPATI MALINAU**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI MALINAU

Malinau, 3 Februari 2022
Pihak Pertama
KEPALA PELAKSANA ,

WEMPI W MAWA, SE.,M.H

IWAN DARMA YUANA, S.Sos., M.Si
NIP. 19690922 1999003 1 008

Catatan : mengambil PK diawal tahun 2022 diaplikasi e saki

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALINAU

No .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	Persentase Penyampaian Informasi kejadian bencana kepada masyarakat	%	100
2.		2	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana.	%	100
3.	Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	1	Persentase pencapaian layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	%	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemulihan pasca bencana	1	Persentase korban bencana yang mendapat pemulihan pasca bencana Kabupaten	%	100

PROGRAM		ANGGARAN		KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.592.262.852,00	APBD
2.	Penanggulangan Bencana	Rp.	479.600.000,00	APBD
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.	RP.	70.547.000,00	APBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	RP.	79.328.000,00	APBD
TOTAL		Rp.	5.221.737.852,00	

Pihak Kedua
BUPATI MALINAU

Malinau, 3 Februari 2022
Pihak Pertama
KEPALA PELAKSANA ,

WEMPI W MAWA, SE.,M.H

IWAN DARMA YUANA, S.Sos., M.Si
NIP. 19690922 1999003 1 008

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan OPD

